

ANALISIS ACTOR NETWORK THEORY DALAM IMPLEMENTASI KEARSIPAN DIGITAL DI INDONESIA

Bambang Aditio¹, Aldri Finaldi²

Universitas Negeri Padang^{1,2}

Email: Bambang.aditio@gmail.com

Informasi

Volume : 3
Nomor : 6
Bulan : Juni
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Abstract

The digital transformation of Indonesian records management through SRIKANDI (Integrated Dynamic Records Information System) faces a fundamental challenge at the actor-network mobilization stage. Although registered users reached 1,491,392 accounts, ANRI's 2025 Accountability and Performance Report reveals that 73%, or 1,089,341, are inactive users. This reflects a critical gap between formal enrolment and substantive mobilization within the Actor-Network Theory (ANT) framework. This article integrates findings from ANRI's 2024 external archival supervision reports to analyze mobilization barriers at the provincial and district/city levels. Supervision results indicate that while all 34 provincial governments possess live SRIKANDI accounts, only 23 provinces (67.6%) actively use the system with transactions exceeding 30% of regional work units. At the district/city level, of 84 sampled governments, 10 (11.9%) have not accelerated implementation at all. Drawing on Callon's (1986) ANT, this article argues that mobilization failure stems not from technical deficiencies alone, but from fragile actor-interest translation, regulatory-infrastructure ecosystem fragmentation, and the absence of organic mobilization mechanisms beyond regulatory pressure. The article offers strategic recommendations centered on strengthening actor value internalization, continuous technical capacity building, and digital records policy harmonization.

Keyword: SRIKANDI; Mobilization; Actor-Network Theory; Digital Transformation; Records Management; Active Users

Abstrak

Transformasi digital kearsipan melalui implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) menghadapi persoalan mendasar pada tahap mobilisasi jaringan aktor. Meski secara kuantitatif jumlah pengguna terdaftar mencapai 1.491.392 akun, data Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2025 mengungkapkan bahwa 26,96% atau sebanyak 402.051 di antaranya merupakan pengguna tidak aktif. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan kritis antara enrolment formal dan mobilization substantif dalam kerangka Actor-Network Theory. Artikel ini mengintegrasikan temuan laporan hasil pengawasan kearsipan eksternal ANRI Tahun 2024 untuk menganalisis hambatan mobilisasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa meski seluruh 34 pemerintah provinsi telah memiliki akun live SRIKANDI, hanya 23 provinsi (67,6%) yang benar-benar menggunakannya secara aktif dengan transaksi lebih dari 30% perangkat daerah. Pada tingkat kabupaten/kota, dari 84 sampel yang diawasi, sebanyak 10 kabupaten/kota (11,9%) belum melakukan percepatan penerapan sama sekali. Dengan menggunakan pendekatan ANT Callon (1986), artikel ini menyimpulkan bahwa kegagalan mobilisasi bukan disebabkan oleh permasalahan teknis semata, melainkan oleh rapuhnya translasi kepentingan aktor, fragmentasi ekosistem regulasi-infrastruktur, serta absennya mekanisme mobilisasi organik yang melampaui tekanan regulator. Artikel menawarkan rekomendasi strategis yang berpusat pada penguatan internalisasi nilai aktor, pembinaan teknis berkelanjutan, dan harmonisasi kebijakan kearsipan digital.

Kata Kunci: SRIKANDI; Mobilisasi; Actor-Network Theory; Transformasi Digital; Kearsipan; Pengguna Aktif

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan merupakan salah satu agenda strategis nasional yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Meiyani & Hardi, 2024). Dalam domain kearsipan, amanat tersebut diwujudkan melalui pengembangan dan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), yang secara resmi diluncurkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tahun 2020 sebagai platform terpadu penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip dinamis secara elektronik.

Secara kuantitatif, pertumbuhan jumlah pengguna terdaftar SRIKANDI menunjukkan tren yang signifikan. Hingga tahun 2025, berdasarkan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja ANRI Tahun 2025, total pengguna yang terdaftar dalam sistem mencapai 1.491.392 akun. Angka ini menggambarkan keberhasilan agenda digitalisasi kearsipan nasional. Namun, di balik angka tersebut tersimpan realitas yang jauh lebih kompleks dan mengkhawatirkan dengan masih adanya 402.051 pengguna merupakan pengguna tidak aktif

Kesenjangan antara pengguna terdaftar dan pengguna aktif ini bukan sekadar persoalan statistik. Ini merepresentasikan krisis mobilisasi dalam jaringan implementasi SRIKANDI sebuah kondisi di mana aktor-aktor yang secara formal telah mendaftar dalam jaringan (enrolled) gagal menjalankan perannya sesuai yang telah didefinisikan dalam program aksi transformasi digital. Dalam kerangka *Actor-Network Theory* yang dikembangkan oleh Michel Callon (1986) dan Bruno Latour (1987), kondisi ini menandai kegagalan parsial pada tahap mobilization tahap paling kritis dalam siklus translasi jaringan aktor.

Hasil pengawasan kearsipan eksternal ANRI Tahun 2024 memberikan gambaran yang lebih konkret atas persoalan ini. Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional Tingkat Daerah (ANRI, 2024) mencatat bahwa meskipun seluruh 34 pemerintah provinsi telah memiliki akun live SRIKANDI, hanya 23 provinsi atau 67,6% yang menggunakan sistem tersebut dengan transaksi antar pengguna dan instansi lain yang melampaui 30 % perangkat daerah. Sementara itu, sebanyak 3 pemerintah provinsi (8,8%) bahkan belum menggunakan sistem secara aktif sama sekali. Kondisi serupa ditemukan pada tingkat kabupaten/kota, di mana dari 84 pemerintah kabupaten/kota yang dijadikan sampel pengawasan, sebanyak 10 (11,9%) belum melakukan percepatan penerapan SRIKANDI.

Persoalan ini menghadirkan pertanyaan penelitian yang fundamental mengapa proses mobilisasi jaringan aktor dalam implementasi SRIKANDI gagal mencapai stabilitas yang sesungguhnya, meskipun upaya enrolment formal telah berjalan dan infrastruktur regulatoris telah tersedia? Pertanyaan ini mendorong diperlukannya analisis yang melampaui perspektif teknis-deterministik dan menyelami dinamika sosioteknis yang membentuk trajektori implementasi.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hambatan mobilisasi dalam implementasi SRIKANDI menggunakan kerangka ANT, dengan mengintegrasikan data empiris dari laporan pengawasan kearsipan ANRI tingkat pusat dan daerah tahun 2024. Kontribusi artikel ini bersifat ganda: secara teoretis, artikel ini memperkaya aplikasi ANT dalam analisis kegagalan mobilisasi e-government di negara berkembang; secara praktis, artikel ini menawarkan rekomendasi berbasis bukti bagi pemangku kebijakan untuk mempercepat mobilisasi jaringan yang berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain analisis dokumen dan tinjauan literatur sistematis (systematic literature review). Data primer diperoleh dari dokumen resmi pemerintah yang relevan, yaitu: (1) Laporan Akuntabilitas dan Kinerja ANRI Tahun 2025; (2) Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional Tingkat Pusat Tahun 2024 (ANRI, 2024a); dan (3) Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional Tingkat Daerah Tahun 2024 (ANRI, 2024b). Data sekunder bersumber dari literatur akademis internasional dan nasional mengenai ANT, implementasi e-government, dan transformasi digital kearsipan yang diperoleh melalui basis data Scopus, dan Google Scholar

Analisis data dilakukan secara interpretif menggunakan kerangka ANT sebagai lensa analitis. Proses analisis mencakup tiga tahapan utama: pertama, identifikasi dan pemetaan aktor-aktor kunci (manusia dan non-manusia) dalam jaringan implementasi SRIKANDI; kedua, penelusuran dinamika proses translasi dengan penekanan khusus pada tahap mobilization dan hambatan-hambatannya; dan ketiga, perumusan rekomendasi strategis yang berbasis pada temuan analisis jaringan. Triangulasi data dilakukan melalui komparasi antara data pengawasan tingkat pusat, data pengawasan tingkat daerah, dan data kinerja pengguna sistem untuk memastikan validitas temuan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Jaringan Aktor dan Implementasi SRIKANDI di Indonesia

Jaringan implementasi SRIKANDI melibatkan aktor yang heterogen dan berlapis. Pada lapisan aktor manusia, terdapat empat kategori utama: (1) aktor pembuat kebijakan Kepala ANRI, Menteri PANRB, Menteri Kominfo, dan Kepala BSSN yang berperan mendefinisikan agenda, menetapkan mandat, dan menciptakan ekosistem regulatoris; (2) aktor pelaksana arsiparis, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), staf administrasi, Jabatan Fungsional Lainnya dan kepala unit kerja yang merupakan subjek mobilisasi utama dan berhadapan langsung dengan sistem dalam keseharian kerja; (3) aktor pembina tim pengawas kearsipan ANRI yang melakukan pengawasan eksternal dan tim pengawas internal instansi yang melakukan verifikasi internal; dan (4) aktor pendukung konsultan teknologi, penyedia infrastruktur, akademisi, dan asosiasi profesional kearsipan.

Pada lapisan aktor non-manusia, aplikasi SRIKANDI merupakan actant sentral yang tidak sekadar menjadi instrumen pasif, melainkan mediator aktif yang mendelegasikan peran tertentu kepada pengguna melalui desain antarmuka, alur kerja ter-encode, dan mekanisme autentikasi. Regulasi termasuk Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, dan berbagai peraturan ANRI berfungsi sebagai actant yang memberikan legitimasi dan mandat normatif. Infrastruktur teknologi, yang mencakup jaringan internet, server pemerintah, dan perangkat keras pengguna, menentukan kondisi kemungkinan operasional sistem. Tanda tangan elektronik bersertifikat BSSN merupakan actant kritis yang menjadi prasyarat teknis partisipasi penuh dalam ekosistem SRIKANDI.

Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional Tingkat Pusat (ANRI, 2024) mencatat bahwa pada tahun 2024, terdapat 82 atau 96,47% kementerian/lembaga yang telah memiliki arsiparis sebagai aktor pelaksana utama meningkat dari 66 atau 71,74% pada tahun 2020. Peningkatan ini menunjukkan bahwa enrolment aktor manusia kunci telah berjalan, namun tidak serta-merta menjamin mobilisasi yang efektif tanpa dukungan faktor-faktor jaringan lainnya.

Hal ini bisa terlihat dari Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional Tingkat Pusat ANRI 2024 memberikan gambaran komprehensif atas perkembangan implementasi SRIKANDI pada kementerian/lembaga. Pada tahun 2024, sebanyak 98,82% dari populasi 170 kementerian/lembaga telah menggunakan aplikasi SRIKANDI hanya tersisa satu lembaga, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang belum menggunakan sistem karena statusnya tidak menjadi sasaran prioritas implementasi SRIKANDI (Indonesia, 2024b). Pencapaian ini menunjukkan keberhasilan tahap enrolment pada level instansi pusat.

Namun demikian, Laporan tersebut juga mencatat bahwa implementasi SRIKANDI pada unit pengolah di masing-masing kementerian/lembaga masih banyak yang belum mencapai 100%. Dengan kata lain, meskipun instansi sebagai entitas kelembagaan telah terenrolment dalam jaringan, mobilisasi pada tingkat operasional yakni adopsi aktif oleh unit pengolah dan pegawaimasih jauh dari optimal. Inilah yang menjelaskan angka 26,96% pengguna tidak aktif dari total 1.491.392 akun terdaftar.

Pada tingkat daerah, Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional Tingkat Daerah ANRI 2024 (Indonesia, 2024a) menyajikan potret yang lebih rinci. Seluruh 34 pemerintah provinsi telah memiliki akun live SRIKANDI sebuah capaian enrolment yang signifikan. Akan tetapi, berdasarkan laporan tersebut, kondisi implementasi aktual bervariasi secara signifikan: sebanyak 23 pemerintah provinsi atau 67,6% menggunakan aplikasi SRIKANDI versi live dengan transaksi antar pengguna dan instansi lain lebih dari 30% perangkat daerah, sementara sebanyak 3 pemerintah provinsi (8,8%) bahkan belum menggunakan aplikasi SRIKANDI secara aktif, disebabkan oleh: (a) sudah memiliki akun SRIKANDI tetapi belum digunakan secara aktif; (b) belum menggunakan aplikasi SRIKANDI versi terbaru; dan (c) masih menggunakan aplikasi lain dan sedang dalam proses sosialisasi serta bimbingan teknis (Indonesia, 2024a)

Kondisi pada tingkat kabupaten/kota bahkan lebih kompleks. Berdasarkan hasil pengawasan eksternal terhadap 84 pemerintah kabupaten/kota yang dijadikan sampel, ANRI mencatat bahwa 74 kabupaten/kota (88,09%) telah berupaya menerapkan SRIKANDI versi live. Dari jumlah tersebut, 43 kabupaten/kota telah melaksanakan transaksi lebih dari 30% perangkat daerah termasuk dengan instansi lain, namun 31 kabupaten/kota (36,9%) masih hanya melakukan transaksi internal dengan kurang dari 30% perangkat daerah. Yang lebih mengkhawatirkan, sebanyak 10 kabupaten/kota (11,9%) sama sekali belum melakukan percepatan penerapan SRIKANDI, dengan penyebab antara lain: (1) masih dalam proses konfigurasi aplikasi; (2) arsiparis dan pengelola masih mengikuti bimbingan teknis; dan (3) belum memiliki tanda tangan elektronik bersertifikat BSSN.

Data-data tersebut secara kolektif menggambarkan krisis mobilisasi yang tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan manifestasi dari kerapuhan jaringan pada seluruh lapisan implementasi dari kementerian/lembaga pusat hingga pemerintah daerah kabupaten/kota.

Problematization dan Interessement Implemetasi Srikandi

Tahap problematization dalam jaringan SRIKANDI berlangsung melalui pendefinisian krisis pengelolaan arsip konvensional yang tidak efisien, tidak sesuai standar, serta risiko kehilangan arsip yang dikombinasikan dengan kewajiban implementasi SPBE. ANRI

memposisikan diri sebagai obligatory passage point dengan menawarkan SRIKANDI sebagai satu-satunya solusi terstandar yang sah bagi seluruh instansi. Strategi ini diperkuat oleh Kementerian PANRB yang menetapkan aplikasi persuratan dan kearsipan dinamis terintegrasi yang ditetapkan sebagai Aplikasi Umum Pemerintah melalui Kepmenpan RB Nomor 679 Tahun 2020 ditambah pengintegrasian indikator digitalisasi arsip ke dalam evaluasi reformasi birokrasi, sehingga seluruh instansi yang menginginkan penilaian reformasi birokrasi yang baik harus melewati SRIKANDI.

Tahap interessement dilaksanakan melalui instrumen regulatoris (surat edaran, peraturan ANRI), instrumen evaluatif (penilaian SPBE dan reformasi birokrasi), dan instrumen kapasitasif (bimbingan teknis, sosialisasi). Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional Tingkat Daerah mencatat bahwa tingkat digitalisasi arsip meningkat pada tahun 2024 pada kategori A (Memuaskan) dari 11 provinsi (32,35%) di tahun 2023 menjadi 13 provinsi (38,24%) di tahun 2024, mengindikasikan bahwa mekanisme interessement melalui evaluasi reformasi birokrasi memberikan dorongan yang signifikan bagi adopsi.

Meskipun demikian, strategi interessement yang tersedia masih didominasi oleh instrumen berbasis kewajiban dan insentif reputasional. Minimnya instrumen berbasis manfaat konkret yang dirasakan langsung oleh pengguna lapangan seperti peningkatan efisiensi kerja yang terukur, pengurangan beban administratif, atau kemudahan temu kembali arsip mengakibatkan proses interessement tidak sepenuhnya menjangkau aktor pelaksana di tingkat operasional. Ini menjadi akar struktural dari krisis mobilisasi yang kemudian berlangsung.

Enrolment Formal versus Enrolment Substantif: Celah yang Mematikan

Tahap enrolment dalam jaringan SRIKANDI mencatat pencapaian yang mengesankan secara kuantitatif. Pada tingkat instansi pusat, 98,82% dari 170 kementerian/lembaga telah menggunakan SRIKANDI versi live (Indonesia, 2024). Pada tingkat daerah, seluruh 34 pemerintah provinsi telah memiliki akun live SRIKANDI. Total pengguna terdaftar mencapai 1.491.392 akun. Angka-angka ini menggambarkan keberhasilan enrolment formal yang substansial.

Namun, di balik angka tersebut terdapat realitas partial enrollment yang mengkhawatirkan. Sebanyak 26,96% atau 402.051 dari total pengguna terdaftar merupakan pengguna tidak aktif (Indonesia, 2025). Partial enrollment ini terjadi karena aktor secara formal bergabung dengan jaringan membuat akun, mengikuti pelatihan, bahkan menandatangani komitmen penggunaannya tanpa benar-benar mengadopsi peran yang telah

ditetapkan dalam program aksi transformasi digital. Dalam terminologi ANT, ini adalah situasi di mana inscription (pendaftaran) terjadi tetapi actor-translation gagal: aktor tidak menerima identitas baru sebagai 'pengelola arsip digital' yang diharapkan dari mereka (Hanseth & Monteiro, 1997).

Partial enrollment ini paling jelas terlihat pada level sub-instansi. Meskipun instansi sebagai entitas telah terenrolment, unit pengolah di dalam instansi tersebut seringkali belum terenrolment secara efektif. Laporan pengawasan tingkat pusat secara eksplisit mencatat bahwa implementasi SRIKANDI pada unit pengolah di masing-masing kementerian/lembaga masih banyak yang belum mencapai 100% sebuah gap enrolment antara kebijakan dengan pelaksanaan

Analisis Hambatan dalam Mobilisasi

Transformasi digital melalui implementasi SRIKANDI masih menghadapi berbagai hambatan yang mengganggu proses mobilisasi aktor dalam jaringan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kapasitas digital aparatur di tingkat daerah. Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional Tingkat Daerah menunjukkan bahwa sebagian arsiparis dan pengelola aplikasi masih mengikuti bimbingan teknis SRIKANDI, yang mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas belum menjangkau seluruh pelaksana secara merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa transfer pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung implementasi sistem belum berlangsung optimal. Selain itu, keterbatasan kapasitas tidak hanya terkait kemampuan teknis penggunaan aplikasi, tetapi juga mencerminkan belum terbentuknya pemahaman mengenai nilai strategis transformasi digital dalam pekerjaan kearsipan. Menurut (Latour, 2005), aktor yang tidak memahami manfaat dan relevansi posisinya dalam jaringan cenderung sulit terlibat secara aktif dalam proses mobilisasi. Akibatnya, partisipasi yang muncul lebih bersifat administratif daripada keterlibatan yang didasarkan pada kesadaran substantif terhadap tujuan transformasi digital.

Selain faktor kapasitas, hambatan infrastruktur turut memperlambat implementasi SRIKANDI. Salah satu prasyarat utama operasional sistem adalah ketersediaan tanda tangan elektronik bersertifikat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Namun, sejumlah pemerintah daerah belum memiliki fasilitas tersebut sehingga pemanfaatan sistem belum dapat berjalan secara optimal. Dalam perspektif ANT, tanda tangan elektronik dapat dipandang sebagai aktor non-manusia yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan jaringan. Ketidakhadirannya membatasi pelaksanaan transaksi elektronik dan menghambat keterlibatan aktor manusia dalam sistem. Permasalahan teknis lainnya terlihat pada belum

seragamnya penggunaan versi aplikasi SRIKANDI. Sebagian daerah masih menggunakan versi yang belum diperbarui atau masih berada pada tahap konfigurasi sistem, sehingga menimbulkan fragmentasi jaringan, menghambat interoperabilitas, dan menunjukkan bahwa prasyarat teknis mobilisasi belum sepenuhnya terpenuhi.

Hambatan berikutnya berasal dari keberadaan sistem kearsipan lama yang masih digunakan oleh sejumlah pemerintah daerah. Beberapa instansi belum beralih sepenuhnya ke SRIKANDI karena masih mengoperasikan aplikasi sebelumnya sambil menjalani proses sosialisasi dan bimbingan teknis. Kondisi ini menciptakan dualitas jaringan, yaitu keberadaan dua sistem yang bersaing memperoleh dukungan dari aktor yang sama. Dalam kerangka ANT, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *counter-translation*, ketika jaringan lama berupaya mempertahankan stabilitasnya melalui kebiasaan kerja, investasi sumber daya, dan tingkat kenyamanan pengguna yang telah terbentuk sebelumnya. Pada saat yang sama, mobilisasi SRIKANDI juga masih didominasi oleh tekanan regulatif. Di banyak daerah, penggunaan sistem lebih didorong oleh kewajiban memenuhi indikator reformasi birokrasi daripada oleh kesadaran atas manfaat sistem itu sendiri. Akibatnya, mobilisasi menjadi rapuh karena bergantung pada tekanan eksternal, bukan pada internalisasi nilai oleh para aktor.

Kondisi tersebut tercermin dari kesenjangan antara jumlah pengguna terdaftar dan pengguna aktif, serta antara jumlah instansi yang telah memiliki akun *live* dengan tingkat pemanfaatan aktual sistem. Fenomena ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi secara administratif tidak selalu diikuti oleh keberhasilan penggunaan secara substantif. Dalam konteks ini, kasus SRIKANDI memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan Actor-Network Theory (ANT) melalui identifikasi pola *layered mobilization failure*, yaitu kondisi ketika mobilisasi berhasil pada satu lapisan jaringan tetapi gagal pada lapisan lainnya. Pada lapisan kebijakan (*policy layer*), mobilisasi relatif berhasil karena kementerian dan lembaga pusat telah menggunakan SRIKANDI. Namun, pada lapisan institusional (*institutional layer*), keberhasilannya masih parsial karena penggunaan internal belum merata, sedangkan pada lapisan operasional (*operational layer*), mobilisasi menjadi paling rapuh karena mayoritas pengguna individu belum aktif.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa model translasi ANT yang linear dari *problematization* hingga *mobilization* perlu diperluas untuk menjelaskan keberhasilan dan kegagalan mobilisasi yang dapat terjadi secara bersamaan pada berbagai lapisan jaringan. (Callon, 1986) menegaskan bahwa mobilisasi yang efektif mensyaratkan adanya keselarasan kepentingan antaraktor, sedangkan penelitian implementasi e-government menunjukkan

bahwa yang sering terjadi adalah *compliance mobilization*, yaitu penggunaan sistem yang bersifat formal tanpa internalisasi nilai dan manfaatnya (Ndou, 2004). Kondisi ini menghasilkan *fragile mobilization*, yakni jaringan yang tampak berjalan secara administratif tetapi belum memiliki ikatan yang cukup kuat untuk bertahan tanpa tekanan eksternal. Temuan tersebut diperkuat oleh (Wahyuni, 2022) yang menunjukkan pentingnya komitmen pimpinan, literasi digital, infrastruktur, dan regulasi dalam adopsi SRIKANDI, serta resistensi terhadap perubahan sebagai hambatan utama. Sejalan dengan itu, Prabowo et al., (2018) mengidentifikasi hambatan teknis, kapasitas, institusional, dan budaya sebagai faktor yang memperlemah mobilisasi sistem digital pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital memerlukan intervensi kebijakan yang terintegrasi untuk mengatasi hambatan pada berbagai lapisan jaringan secara simultan.

D. KESIMPULAN

Analisis implementasi SRIKANDI menggunakan kerangka Actor-Network Theory (ANT) menunjukkan adanya krisis mobilisasi yang nyata dalam jaringan implementasi sistem. Hal ini tercermin dari tingginya proporsi pengguna tidak aktif, yaitu sekitar 26,96% dari akun terdaftar. Meskipun proses *enrolment* formal telah mencapai tingkat yang tinggi, ditandai dengan 98,82% kementerian/lembaga dan 100% pemerintah provinsi memiliki akun live SRIKANDI, mobilisasi substantif masih terbatas. Data pengawasan kearsipan ANRI tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya 67,6% pemerintah provinsi dan 51,2% pemerintah kabupaten/kota sampel yang melakukan transaksi pada lebih dari 30% perangkat daerah. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kepatuhan administratif dan penggunaan aktual sistem. Hambatan mobilisasi juga bersifat multidimensional dan saling memperkuat, meliputi keterbatasan kapasitas digital, kendala infrastruktur seperti belum tersedianya tanda tangan elektronik bersertifikat BSSN, resistensi terhadap sistem lama, proses konfigurasi yang belum tuntas, serta dominasi tekanan regulator dibandingkan motivasi intrinsik pengguna. Temuan tersebut mengarah pada konsep *layered mobilization failure*, yaitu kondisi ketika mobilisasi berhasil pada lapisan kebijakan, tetapi belum mampu menghasilkan mobilisasi yang kuat pada lapisan institusional dan operasional.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan strategi intervensi yang lebih komprehensif untuk memperkuat mobilisasi aktor dalam jaringan SRIKANDI. Penguatan kapasitas aparatur perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui program pengembangan kompetensi yang tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada pemahaman

manfaat strategis digitalisasi kearsipan. Di sisi lain, percepatan pemenuhan prasyarat teknis, khususnya sertifikasi tanda tangan elektronik BSSN, perlu menjadi prioritas agar seluruh aktor dapat berpartisipasi secara penuh dalam ekosistem SRIKANDI. Selain pendekatan berbasis kewajiban yang selama ini dominan, ANRI juga perlu mengembangkan mekanisme mobilisasi berbasis manfaat melalui diseminasi praktik baik, pengembangan fitur yang memberikan nilai tambah langsung bagi pengguna, serta penguatan jejaring pembelajaran antarinstansi. Selanjutnya, model pengawasan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih adaptif dengan membedakan strategi pembinaan bagi instansi yang belum terenrolment, telah terenrolment tetapi belum termobilisasi, dan instansi yang telah termobilisasi namun belum optimal, sehingga intervensi yang diberikan menjadi lebih tepat sasaran.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Callon, M. (1986). Some elements of a sociology of translation: Domestication of the scallops and the fishermen of St Briec Bay. In J. Law (Ed.), *Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge*. Routledge.
- Hanseth, O., & Monteiro, E. (1997). Inscribing behaviour in information infrastructure standards. *Accounting, Management and Information Technologies*, 7(4), 183–211. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0959-8022\(97\)00008-8](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0959-8022(97)00008-8)
- Indonesia, A. N. R. (2024a). Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional Tingkat Daerah.
- Indonesia, A. N. R. (2024b). Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Nasional Tingkat Pusat Tahun 2024. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Indonesia, A. N. R. (2025). Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2025. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Latour, B. (2005). *Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford University Press.
- Meiyani, E., & Hardi, R. (2024). Transformasi Digital dan Pemerintahan Responsif. In M. R. Akbar (Ed.), *Eureka Media Aksara*. Eureka Media Aksara.
- Ndou, V. (2004). E-Government for Developing Countries: Opportunities and Challenges. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 18(1), 1–24.
- Prabowo, T. J. W., Astuti, E. S., & Susilo, H. (2018). Barriers to E-Government Adoption in Indonesia Local Government. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 4(1), 11. <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2018.090280>
- Wahyuni, S. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi sistem informasi

kearsipan SRIKANDI di instansi pemerintah pusat. *Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 7(1), 45-68.